

DAFTAR PUSTAKA

<https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang> diakses pada tanggal 04 September 2021, pukul 00.46 WIB

KRISTARANI, H. (2018). *Perumusan Indikator Kota Layak Huni Untuk Kota Sedang di Kota Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Iswara, R., Astuti, W., & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Fungsi Taman Kota Dalam Mendukung Konsep Kota Layak Huni Di Surakarta. *ARSITEKTURA*, 15(1), 115-123.

Windi, W., & Akromusyuhada, A. (2021). Penataan Daerah Pusat Kegiatan Bisnis/Central Business District (CBD) Bombana, Sulawesi Tenggara. *Pelita Teknologi*, 15(2), 106-116.

DANIEL RATO, D. A. N. I. E. L. (2018). *PEMBANGUNAN KOTA BERDASARKAN LINGKUNGAN (STUDI KOTA YOGYAKARTA)*.

Martin, W., Sela, R. L., & Rompas, L. M. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Menuju Kota Layak Huni (Livable City) Studi Kasus Kota Manado. *SPASIAL*, 6(2), 345-353.

Suryaningsih, M. (2017). *Penilaian Kinerja Kelayakhunian Permukiman Kawasan Perkotaan Gresik berdasarkan Persepsi Stakeholder* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

- Makalalag, A., Gosal, P. H., & Hanny, P. (2019). KAJIAN KOTA KOTAMOBAGU MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY). *SPASIAL*, 6(2), 199-210.
- Sambuaga, R. (2017). Manajemen Penanggulangan Kemacetan Transportasi Publik Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(24), 4.
- SETIAWATI, N. (2018). *IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN JALAN (LEVEL OF SERVICE) DI RUAS JALAN JENDRAL SOEDIRMAN KABUPATEN PURBALINGGA* (Doctoral dissertation, undip).
- Muttaqin, D. (2010). Most Livable City Index, Tantangan Menuju Kota Layak Huni. *Bulletin Tata Ruang Edisi Januari-Februari*, 1978-1571.
- Nawangwulan, G., & Sutriadi, R. (2015). Kajian Ketercapaian Kota Layak Huni (Liveable City) Kota Balikpapan.
- Pratiwi, W. N. (2016). Analisis Indikator Pembangunan Kota Medan Sebagai Kota Layak Huni.
- Darise, D. I. (2015). Kajian Kota Manado Sebagai Kota Layak Huni Berdasarkan Kriteria (IAP) Ikatan Ahli Perencanaan. *SPASIAL*, 1(1), 131-140.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2020. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sasongko, D., dkk. 2000. *Kebisingan Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-09-2004-B. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Nasution, H. M. (2003). Manajemen Transportasi, Ghalia, Jakarta. *Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014, Bab IV. Pasal, 26.*

Tanan, N. 2011. *Fasilitas Pejalan Kaki*. Kementerian PU. Bandung.

Pemerintah Indonesia. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Kementerian Perhubungan

Sugiyanto, G. (2011). *Pengembangan Model dan Estimasi Kemacetan Bagi Pengguna Mobil Dan Sepeda Motor Pribadi di Kawasan Pusat Perkotaan*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Indonesia, M. K. J. (1997). Direktorat Jenderal Bina Marga. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Setiawan, A. *Pengendalian Jalan Di Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumnas Sadang Serang Bandung)*. *SMARTek*, 4(1).

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia. 1996. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

E, Da Costa. 2019. *Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Akibat Pembangunan Jogja Apartement*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Crabtree, S., & Index, G. H. W. B. (2010). *Wellbeing lower among workers with long commutes*. GallupNews Service.

Kota Pariaman. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat

Chairunnisa, Y., & Rachmawati, R. (2012). *Kajian Penyediaan dan Pemanfaatan Pelayanan Transportasi Publik Di Kota Bekasi*. Jurnal Bumi Indonesia

